

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, Dhani (2021). *Tinjauan Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban PPh Pasal 21 Oleh Wajib Pajak Semasa Pandemi Covid-19 Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Semarang Timur*. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, K. P. (2016). KBBI Daring.
- Badan Pusat Statistik. (2021, Februari 23). Badan Pusat Statistik. bps.go.id: <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali. (2021, Mei 10). Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali. [boyolalikab.bps.go.id: https://boyolalikab.bps.go.id/statictable/2021/05/10/1237/-jumlah-industri-besar-dan-sedang-menurut-kecamatan-di-kabupaten-boyolali-2020.html](https://boyolalikab.bps.go.id/boyolalikab.bps.go.id/statictable/2021/05/10/1237/-jumlah-industri-besar-dan-sedang-menurut-kecamatan-di-kabupaten-boyolali-2020.html)
- Cahyonowati, N. (2011). Model moral dan kepatuhan perpajakan: Wajib Pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 15(2).
- Direktorat Jenderal Pajak. (2016). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16 Tahun 2016.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2020.
- Hamzah, M. F., & Muslim, M. (2018). Faktor-Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (studi empiris pada KPP Pratama Kabupaten Sidrap). *Journal Of Institution And Sharia Finance*, 1(1).
- Judisseno, R. K. (2004). *Perpajakan Edisi Revisi*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- KPP Pratama Boyolali. (2019). *Buku Profil Tahunan KPP Pratama Boyolali*. Boyolali.
- Laksmi, A. N. (2019). *Tinjauan Atas Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 Universitas X*. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Jakarta: Kementerian Keuangan.

- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Pasaribu, G. F., & Tjen, C. (2016). THE IMPACT OF DEMOGRAPHIC FACTORS ON TAX COMPLIANCE IN INDONESIA. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1(2).
- Republik Indonesia. (2020). Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.
- Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.
- Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.
- World Health Organization. (2020). World Health Organization. who.int :https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1
- World Health Organization. (2020, Maret 11). World Health Organization. who.int:<https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>